

EVALUASI KINERJA PERUMDA

TABLOID



GRATIS.
TIDAK DIPERJUALBELIKAN

RUMAH RAKYAT

• DPRD KOTA MAKASSAR



EDISI JUNI 2024

PENGANTAR

PEMBINA/PENASEHAT

Ketua DPRD Kota Makassar
Rudianto Lallo, SH

Wakil Ketua I
Adi Rasyid Ali, SE

Wakil Ketua II
Ir. Andi Suhada Sappaile

Wakil Ketua III
H. Andi Nurhaldin NH, SE

Ketua Komisi A
Rahmat Tagwa Qurais

Ketua Komisi B
Erick Horas

Ketua Komisi C
Sangkala Saddiko

Ketua Komisi D
Andi Hadi Ibrahim Baso

PENGARAH:

Sekretaris DPRD Kota Makassar
H. Dahyal, S.Sos.,M.Si.

PENANGGUNG JAWAB:

PPID Pembantu Sekretariat
DPRD Kota Makassar

Kabag Umum
Dr. Muhajir, SKM., M.Kes

Kabag Keuangan
Abd. Kadir, SE., MM

Kabag Persidangan
Dr. Hj. Widiawati Said, S.Sos., S.Pd

Kabag Perlengkapan
Daniel Katto, SE.,MM

ALAMAT KANTOR:

DPRD Kota Makassar
Jl. Andi Pangerang Pettarani,
Blok E No. 1-2 Tidung, Kec.
Rappocini, Kota Makassar,
Sulawesi Selatan 90222

Selamat datang di edisi Mei majalah DPRD Makassar. Pada kesempatan ini, kita akan mengangkat tema penting mengenai peran Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini, sudah saatnya Perumda di Makassar bertransformasi menjadi entitas yang lebih produktif dan inovatif. Kami percaya bahwa dengan pengelolaan yang baik dan strategi yang tepat, Perumda dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan daerah. Di dalam edisi ini, kami akan membahas langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan kinerja

Perumda, termasuk berbagai inisiatif yang telah dan akan diluncurkan. Kami juga akan menampilkan wawancara dengan para pemimpin Perumda serta praktik terbaik dari daerah lain yang dapat dijadikan inspirasi.

Kami berharap informasi dan pemikiran yang tersaji dalam edisi ini dapat memotivasi semua pihak untuk bersinergi dalam meningkatkan produktivitas Perumda demi kemajuan Makassar yang lebih baik. Terima kasih atas perhatian Anda, dan selamat membaca!

Hormat kami Makassar 30 Juni 2024

DAFTAR ISI

- | | | | |
|-----------|--|-----------|--|
| 04 | Bamus DPRD Makassar Gelar Rapat Pembahasan Kegiatan | 20 | Pandangan Umum Fraksi pada APBD 2023 Jadi Fokus Pemkot Makassar |
| 05 | DPRD Makassar Ucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1445 | 22 | Gerindra Apresiasi Penyusunan RPJPD Kota Makassar dan Dukung Percepatan Implementasi |
| 06 | Sekretariat DPRD Makassar Sosialisasikan Perda Tentang Rumah Susun | 23 | Kasrudi Pertanyakan Minimnya Pencapaian Retribusi Daerah di Tahun 2023 |
| 07 | Dewan Kawal Kasus Korban Bully SMPN 4 Makassar Sampai Tuntas | 24 | Fraksi PAN Fokus Pembangunan Berbasis Kearifan Lokal dan Inovasi |
| 08 | Paripurna Bahas Pandangan Fraksi Terkait Ranperda APBD 2023 | 25 | Legislator Makassar Gerah Persoalan Air Bersih Warga Barombong Tak Pernah Jadi Prioritas |
| 09 | Irwan Djafar Minta Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat Tekan Kriminalitas di Rumah Kost | 26 | Sekretariat DPRD Makassar Sosialisasikan Perda Baca Tulis Al-Qur'an |
| 10 | Bahas Soal Kepemudaan, Muchlis Misbah Pacu Kreativitas Pemuda | 27 | Catatan Fraksi PKS DPRD Makassar Buat Wali Kota Danny |
| 11 | Azwar Dorong Pemuda Makassar Berperan dalam Pembangunan | 28 | Syukuran dan Perayaan Ulang Tahun ke-42 Rudianto Lallo: Panjang Umur Pengabdian |
| 12 | Kurangi Sampah, Budi Hastuti Berharap Warga Cerdas Memilah dan Daur Ulang | 29 | Sosialisasi Perda Peningkatan Kualitas Pendidikan |
| 13 | Abdul Wahid Harap Warga Miskin Makassar Bisa Akses Bantuan Hukum Gratis | 30 | Perkenalkan Tupoksi Anggota Dewan ke Mahasiswa KKLP |
| 14 | Komisi D DPRD Makassar Tanggapi Penundaan Penerapan Tapera | 31 | Azwar Dorong Pemuda Makassar Berperan dalam Pembangunan |
| 15 | DPRD Makassar Soroti Kinerja dan Pendapatan dari Perumda Kota | 32 | Rudianto Lallo Ajak Masyarakat Jaga Keutuhan dan Keharmonisan Bangsa |
| 16 | Komisi D DPRD Makassar Minta Disdik Buka Sekolah Bila Ada Keputusan Pusat | 33 | Ketua DPRD Makassar Sosialisasi Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik |
| 17 | Anggota Komisi B Ingatkan Camat Lurah Tak Berpolitik Praktis di Pilwali Makassar | 35 | Andi Pahlevi Harap Pengerjaan Infrastruktur di Dapil 2 Berjalan Baik |
| 18 | Lebih Dekat dengan Adi Rasyid Ali, Sang Vokalis DPRD Kota Makassar | | |

Bamus DPRD Makassar Gelar Rapat Pembahasan Kegiatan



Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Makassar menggelar rapat untuk membahas rencana kegiatan kedewanan yang akan dilaksanakan pada bulan Juni. Rapat ini dipimpin oleh Koordinator Bamus DPRD Kota Makassar, Nurhaldin NH.

Agenda rapat meliputi penetapan jadwal kegiatan, pembahasan isu-isu strategis yang akan dibahas oleh DPRD, serta evaluasi program kerja yang telah dilaksanakan pada bulan sebelumnya.

Koordinator Bamus, Nurhaldin menekankan pentingnya koordinasi yang baik antara anggota untuk memastikan semua kegiatan berjalan lancar dan sesuai dengan rencana.

Hasil rapat ini akan menjadi panduan bagi seluruh anggota DPRD Kota Makassar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka selama bulan Juni, dengan tujuan utama untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Makassar.

DPRD Makassar Ucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1445



DPRD Kota Makassar mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Hari raya kurban ini sendiri bertepatan pada Senin, 17 Juni 2024.

"Segenap Pimpinan dan Anggota DPRD kota Makassar mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1445 H," tulis akun media sosial DPRD Kota Makassar, Minggu 16 Juni 2024.

DPRD Makassar menekankan kembali nilai-nilai dalam kisah Nabi Ibrahim dan anaknya, Nabi Ismail.

"Semoga kita dapat mengambil hikmah dari pengorbanan dan ketakwaan Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS," ujarnya.

Untuk diketahui, pelaksanaan shalat Idul Adha dipusatkan di sejumlah titik untuk di kota Makassar. Adapun titik utama yang akan dipadati oleh jemaah yakni Lapangan Karebosi, Anjungan Pantai Losari, Masjid Al-Markas, Masjid Raya, dan Masjid 99 Kubah.

Sekretariat DPRD Makassar Sosialisasikan Perda Tentang Rumah Susun

Sekretariat DPRD Kota Makassar menggelar kegiatan sosialisasi penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) untuk Angkatan XI. Kali ini mengangkat Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rumah Susun.

Kegiatan sospers ini digelar di Hotel Grand Asia, Jalan Boulevard, Makassar, Sabtu (8/6/2024). Menghadirkan tiga orang narasumber dari kalangan praktisi dan pemerhati lingkungan.

Masing-masing Didis Abdi Abubaeda, Irwan Ali dan Ilham Adam. Sosialisasi perda ini dipandu oleh moderator, Tri Lestari Wulandari.

Mengawali materinya, Didis Abdi Abubaeda menyebut bahwa sosialisasi perda tentang rumah susun ini sangat penting dilakukan. Mengingat pertumbuhan penduduk Kota Makassar saat ini terus meningkat secara drastis.

"Pertumbuhan penduduk ini tidak diikuti dengan tersedianya lahan untuk

membangun rumah hunian. Makanya, mau tidak mau kedepannya Kota Makassar harus menyediakan rumah susun. Pemerintah harus menyiapkan konsep rumah susun itu dari sekarang," katanya.

Menurut Didis, pembangunan rumah susun harus disesuaikan dengan model dan bentuk sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perda tersebut. Termasuk wajib mengantongi izin dan menyediakan sarana prasarana utilitas (PSU).

"Bukan cuma pemerintah, tapi seluruh masyarakat luas yang ingin membangun rumah susun harus memahami perda ini. Jadi saya minta kepada peserta yang sudah mengetahui aturan-aturan ini untuk menyebarluaskan ke masyarakat umum," tambahnya.

Sementara itu, pemateri lainnya, Irwan Ali menjelaskan bahwa perda yang disosialisasikan ini lebih banyak mengatur tentang bagaimana pengelolaan dan mekanisme pembangunan rumah susun yang dilakukan oleh pihak swasta.



Dewan Kawal Kasus Korban Bully SMPN 4 Makassar Sampai Tuntas



DPRD Kota Makassar geram dengan kasus situasi praktik bullying yang terjadi di SMPN 4 Makassar. Menindaklanjuti hal tersebut, terulang Pemerintah Kota Makassar diminta untuk disiplinkan sekolah terkait praktik Bullying.

Hal ini disampaikan Anggota DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham. Ia mengatakan telah mendapatkan laporan langsung dari pihak orang tua siswa yang mendapatkan bullying di sekolah.

Terlebih lagi, siswa yang mendapatkan kasus tersebut adalah siswa disabilitas yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari pihak sekolah.

"Korban ini adalah siswa disabilitas, sehingga kita di Kota Makassar itu sangat menjaga untuk menghindari mereka dari

tindakan bully. Seharusnya, pihak sekolah lebih jeli lagi atau lebih bergerak, bagaimana untuk menjaga anak-anak kita di sekolah," katanya, Selasa (18/6/2024). Apalagi, ada unsur sekolah yang mengaku hal bullying biasa terjadi. Inilah yang membuat Legislator Fraksi NasDem Makassar ini geram, sebab sekolah harusnya menjadi perlindungan dan pencegah tindakan tersebut terjadi di sekolah.

"Karena kan tentunya orang tua menitipkan anaknya di sekolah dengan harapan bahwa seluruh oknum atau seluruh pihak-pihak di sekolah itu menjaga dengan baik. Tapi kalau ada hal seperti ini kan, sangat merusak mental dari anak-anak kita. Jangan sampai anak ini, sudah merasa tidak percaya diri ataukah merasa sakit hati," ujarnya.

Paripurna Bahas Pandangan Fraksi Terkait Ranperda APBD 2023

DPRD Kota Makassar menggelar rapat paripurna dengan agenda Pemandangan Umum Fraks-fraksi terhadap Penjelasan Walikota atas Ranperda, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Makassar tahun 2023.

Rapat paripurna berlangsung di ruang rapat paripurna gedung DPRD Makassar, Jumat, 21 Juni 2024. Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Rudianto Lallo yang didampingi Wakil Ketua II Andi Syuhada Sappaile.

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto juga hadir langsung bersama para pimpinan OPD Pemkot Makassar.

Juru bicara sejumlah fraksi dalam pandangan umumnya mengapresiasi pencapaian Pemkot Makassar yang telah tiga kali berturut turut meraih predikat WVTP

dari BPK RI Perwakilan Sulsel atas Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD TA 2023.

Sementara Wali Kota Danny Pomanto memastikan beberapa pandangan-pandangan umum yang disampaikan Fraksi DPRD Makassar pada APBD 2023 akan fokus menjadi perhatiannya, seperti restribusi daerah dan penanganan stunting.

Selanjutnya, Danny Pomanto dijadwalkan akan memberikan tanggapan atau jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi pada rapat paripurna yang dilaksanakan besok, Sabtu, 22 Juni 2024. (*)



Irwan Djafar Minta Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat Tekan Kriminalitas di Rumah Kost



Anggota DPRD Kota Makassar, Irwan Djafar menggelar sosialisasi penyebarluasan Perda nomor 10 tahun 2011 tentang Pengelolaan Rumah Kost di Hotel Grand Maleo, Makassar, Selasa (4/6/2024).

Dalam sambutannya, Irwan Djafar mengatakan pemerintah, aparat keamanan bersama masyarakat saling bersinergi untuk menjaga setiap rumah kost yang ada di wilayah masing-masing.

"Pemerintah dan aparat keamanan lebih rutin lagi melakukan penertiban dan sidak rumah kost di Makassar agar dapat mengurangi angka kriminalitas yang sering terjadi," katanya.

Legislator Partai Nasdem ini berharap dengan adanya aturan terkait pengelolaan rumah kost dapat minimalisir tingkat terjadinya kasus-kasus yang

selama ini meresahkan masyarakat.

Karena rumah kost ini sangat membantu bagi pendatang dari luar Kota Makassar untuk tinggal dan berdomisili dengan tujuan tertentu, makanya sebagai penghuni rumah kost kita harus taat terhadap aturan yang ada," tambah Anggota Komisi A DPRD Makassar ini.



Sementara itu hadir sebagai narasumber, Muh Yusran menjelaskan rumah kost harus dikelola sesuai Perda. Salah satu yang ditekankan adalah memastikan peruntukannya.

"Kalau ada rumah kost disekitar kita itu patut diawasi, jangan sampai tidak dikelola sebagaimana mestinya," singkatnya. (*)

Bahas Soal Kepemudaan, Muchlis Misbah Pacu Kreativitas Pemuda

Anggota DPRD Kota Makassar, Muchlis A Misbah menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kepemudaan di Hotel Grand Imawan, Makassar, Kamis (6/6/2024).

Sosialisasi Perda kali ini mengandeng dua narasumber. Di antaranya, Pejabat Sekretariat DPRD Makassar, Muh Yusran dan M Syachrul Maulana.

Dalam kesempatan itu, Anggota DPRD Kota Makassar, Muchlis Misbah menyebut Perda ini bertujuan mengembangkan kreativitas generasi muda khususnya di Makassar. Ia pun berharap pemuda mempunyai semangat dan kreativitas dalam membangun daerah hingga bangsa. Sebab, mereka inilah yang nantinya akan melanjutkan estafet kemajuan bangsa.

"Pada dasarnya Perda ini bertujuan mengembangkan kreativitas anak muda. Memiliki inovasi dan kreativitas hingga ikut andil dalam pembangunan di Makassar," harapnya.

Sementara itu, Yusran menilai poin dari Perda ini ialah bagaimana tanggungjawab pemerintah terhadap pemuda. Terlebih mampu memfasilitasi pemuda khususnya di Makassar.

"Pemerintah kota bersama anggota DPRD Makassar sangat bertanggung jawab. Sangat memfasilitasi pemuda-pemuda lewat Dinas Pemuda dan Olahraga," singkatnya.



Azwar Dorong Pemuda Makassar Berperan dalam Pembangunan



Anggota DPRD Makassar, Azwar menggelar kegiatan sosialisasi penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 06 Tahun 2019 tentang Kepemudaan di Hotel Max One, Makassar, Minggu (9/6/2024).

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pemuda bagaimana peran mereka di dalam Perda tersebut. Ratusan konstituen di wilayah daerah pemilihan (Dapil) 4 meliputi Kecamatan Panakkukang dan Manggala hadir dalam giat tersebut.

Azwar saat memberi sambutan sekaligus membuka kegiatan menyampaikan, dengan mengetahui substansi dan muatan dari Perda Kepemudaan, para pemuda diharapkan dapat mengetahui perannya dalam turut serta membangun kota. "Mengetahui Perda kepemudaan tersebut, pada gilirannya turut menyukseskan

pelaksanaan. Karena masalah kepemudaan harus melibatkan para pemuda itu sendiri dalam pembinaan agar menjadi orang yang berkarakter membangun kota dan negara ini," kata Azwar.

Legislator PKS itu berharap agar pemuda bisa mengaplikasikan dan mengambil peran di tengah masyarakat.

"Kalau pemuda tahu perannya, setidaknya kenakalan remaja, pemuda terkait tindak kriminalitas juga bisa diturunkan," katanya. Dalam sosialisasi Perda kepemudaan itu melibatkan dua narasumber, yakni M Yusran, SKM dan Muh Noer Ashari.

M Yusran secara detail membahas isi dari Perda mengenai potensi dan akses untuk pengembangan skill pemuda. Perda ini memberikan payung hukum yang kuat kepada pemuda.

Kurangi Sampah, Budi Hastuti Berharap Warga Cerdas Memilah dan Daur Ulang

Anggota DPRD Kota Makassar, Budi Hastuti berharap warga bisa mengelola sampah untuk menjaga lingkungan sekitar.

Demikian disampaikannya saat Sosialisasi Penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Hotel Favor, Jl Lasinrang, Sabtu (15/6/2024).

dimanfaatkan. Dengan begitu, sampah bisa direduksi.

"Kalau sampah bisa dikurangi itu lebih baik. Kita juga bisa bantu pemerintah," tukasnya.

Sementara itu, narasumber sosialisasi, Puspito Hargono sependapat bahwa



Ia mengatakan pengelolaan sampah penting dilakukan mulai dari rumah tangga. Sebab kebanyakan sampah yang ada di TPA berasal dari rumah tangga.

"Bayangkan saja banyak rumah itu pasti banyak sampahnya, apalagi kalau langsung dibuang saja pasti itu makin menumpuk," ujarnya.

Ia menilai warga mesti mulai cerdas dalam memilah dan sebisa mungkin mendaur ulang sampah yang bisa kembali

sampah bisa dimanfaatkan kembali. Daur ulang, menurutnya, dapat membuat sampai menjadi barang bernilai.

"Sudah banyak orang yang bisa mendaur ulang, sampahnya bisa jadi bingkai dari sampah koran, dan banyak lagi," singkatnya.



Abdul Wahid Harap Warga Miskin Makassar Bisa Akses Bantuan Hukum Gratis



Anggota DPRD Kota Makassar, Abdul Wahid menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Hotel MaxOne, Makassar, Sabtu (15/6/2024).

Abdul Wahid menyampaikan Perda ini dibentuk pemerintah kota dan legislatif untuk membantu masyarakat kategori kurang mampu, dalam hal pelayanan hukum.

Dengan kondisi masyarakat saat ini, dimana begitu banyak yang terjerat masalah hukum, namun tidak memiliki biaya untuk menyewa pengacara.

"Masyarakat harus tau, kalau pemerintah itu menyediakan perda bantuan hukum secara gratis untuk masyarakat yang kurang mampu," tutur Legislator Fraksi PPP ini. Sebagai narasumber sosialisasi, pemerhati hukum, Ali Taupan menjelaskan dalam

penyelenggaraan bantuan hukum itu berdasarkan keadilan bagi masyarakat yang kurang mampu.

"Bantuan hukum ini diberikan kepada setiap orang atau kelompok kurang mampu yang menghadapi setiap masalah hukum, keperdataan, pidana dan tata usaha negara," jelasnya.

Kemudian, kata dia, bagi yang bersangkutan ingin mendapatkan pendampingan hukum bisa langsung mengajukan dokumen persyaratan ke bagian hukum pemerintah kota.

"Jadi di kota Makassar Makassar itu hanya ada 9 lembaga bantuan hukum yang terdaftar di kementerian hukum dan HAM itupun kategori C, bisa langsung lewat LBH ataupun ke bagian hukum pemerintah kota," tutupnya.

Komisi D DPRD Makassar Tanggapi Penundaan Penerapan Tapera



Penundaan penerapan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) mendapat tanggapan dari Anggota Komisi D DPRD Kota Makassar, Hamzah Hamid. Ia menilai penundaan penerapan Tapera adalah langkah yang tepat di tengah kondisi ekonomi saat ini.

"Saya kira tepat sekali kalau itu ditunda, karena jika diberlakukan akan memberikan banyak beban kepada masyarakat," ujar Legislator PAN itu, Senin 10 Juni 2024. Hamzah menjelaskan, saat

ini masyarakat tengah menghadapi kenaikan harga-harga kebutuhan pokok dan tarif listrik. Jika ditambah dengan kewajiban membayar Tapera, maka akan semakin memberatkan beban masyarakat.

"Di mana listrik naik, bahan pokok naik, semua naik. Jadi, kalau ditambah lagi dengan Tapera, berarti menjadi beban baru bagi masyarakat," tambahnya.

Oleh karena itu, Hamzah Hamid mendukung penuh penundaan penerapan

Tapera untuk sementara waktu sampai kondisi ekonomi membaik.

"Tepat sekali, kalau perlu ditunda saja dulu penerapan Tapera ini," pungkasnya.

Dengan penundaan ini, diharapkan masyarakat dapat terhindar dari beban ekonomi yang semakin berat dan pemerintah dapat mencari waktu yang tepat untuk menerapkan program Tapera secara efektif.

DPRD Makassar Soroti Kinerja dan Pendapatan dari Perumda Kota

Sejumlah anggota DPRD Kota Makassar menyoroti kinerja sejumlah Perumda di Kota Makassar. Salah satunya terkait PDAM. Anggota DPRD Ary Ilham menduga terjadi kebocoran pendapatan di Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Makassar yang ada.

Dia menganggap Direksi Perumda Makassar perlu berinovasi dalam engelolaan pendapatan dan pengawasan terhadap pendapatan.

Sementara itu, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto mengaku memang banyak hal yang perlu dibenahi.

Meski begitu, dia menilai direksi yang saat ini sudah sangat optimal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Memang RPH kehabisan modal, terminal untung

jalan. Tapi memang banyak yang perlu dibenahi, saya tidak yakin walaupun kita ganti direksi bisa sama persoalan itu," kata Danny pada Rabu, 26 Juni 2024.

Dia juga menyebut, pendapatan Perumda Parkir Makassar Raya masih jauh dari target. "Parkir, justru parkir sekarang sudah dua kali lipat meskipun masih jauh dari potensinya, bisa

baik, pasar kita sudah ganti direksi, karena banyak hal (tidak beres), lelang pasar sudah selesai dan saya harap yang terpilih bisa mengatasi masalah-masalah yang ada di pasar.

Anggota DPRD Kota Makassar, Ari Ashari Ilham mempertanyakan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah setiap tahun sangat rendah.

Menurutnya, beberapa Perumda Makassar tidak menghasilkan deviden. Sebagian besar Perusahaan Daerah milik Pemkot dirasakan seperti membiarkan

tiga kali lipat dari sekarang," kata dia. Kinerja direksi Perumda Makassar saat ini cukup baik. Kecuali Perumda Pasar Makassar Raya yang saat ini masih proses seleksi jabatan direksi.

Dia menilai Direksi cukup adanya kebocoran pendapatan dengan kurangnya inovasi dan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pengelolaan pendapatan dan pengawasan pendapatan, serta evaluasi pendapatan di masing-masing Perumda.



tiga kali lipat dari sekarang," kata dia.

Kinerja direksi Perumda Makassar saat ini cukup baik. Kecuali Perumda Pasar Makassar Raya yang saat ini masih proses seleksi jabatan direksi.

Dia menilai Direksi cukup

Komisi D DPRD Makassar Minta Disdik Buka Sekolah Bila Ada Keputusan Pusat

Wakil Ketua Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar Fatmawati Wahyudin mengatakan pembukaan aktivitas belajar sekolah, menunggu keputusan pemerintah pusat.

"Jadi, untuk anak-anak sekolah, kita masih menunggu dari Dinas Pendidikan yang juga masih menunggu keputusan dari Kementerian Pendidikan. Apa yang menjadi putusan pusat, itulah yang akan diterapkan," kata Fatma, Selasa (2/6).

Fatma menjelaskan, poin yang disampaikan Presiden RI yang beredar di media sosial, masih menginginkan sekolah by online, tetapi dirumah dan belajarnya tetap di rumah.

Selain belum ada putusan pusat terkait aktivitas belajar di sekolah, Fatma juga mengatakan, grafik dari Covid-19 di Kota

Makassar masih terus meningkat. Sehingga kata dia, proses belajar di sekolah masih sangat rawan.

Dia menekankan, kalau grafik reproduksi (R0) virus corona sudah di bawah satu itu, bisa laksanakan new normal termasuk menjalankan aktivitas pendidikan di sekolah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

"Sampai Juli, anak-anak belum bisa masuk sekolah dulu. Tapi, untuk pendaftaran dibulan Juni melalui sistem Online. Jadi tidak ada pertemuan tatap muka," ungkap Fatma.

Fatma menyimpulkan, jika ada intruksi dari pusat kepada Dinas Pendidikan Kota Makassar, maka Komisi D bersepakat. Namun lanjut dia, karena pandemi masih terjadi, maka tetap harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat saat





Anggota Komisi B Ingatkan Camat Lurah Tak Berpolitik Praktis di Pilwali Makassar

Jelang Pemilihan Wali Kota (Pilwali) anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Makassar Mario David ingatkan camat lurah untuk tidak melakukan politik praktis.

"Saya mengingatkan teman-teman semua berhenti berpolitik praktis, berlakulah dengan perilaku aparat pemerintahan demokrasi yang baik, jujur, dan amanah," ujarnya dalam agenda pembahasan

Ranperda pertanggjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023, di ruang rapat DPRD Makassar, Selasa (25/6/2024). Dirinya mengingatkan jika ASN terikat dalam peraturan perundang-undang, sehingga Mario berharap jika camat lurah tidak ikut dalam konsolidasi politik.

Mario juga menjelaskan jika pernah ada camat yang hampir mendapatkan hukum kedisiplinan karena melanggar netralitas ASN, pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 silam.

"Jadi saya ingatkan hati-hati pernah ada kejadian, Mungkin teman-teman ingat, pak Sahrul itu teman-teman semua nyaris kena kedisiplinan berat tapi tidak, setidaknya di hukum," jelas Mario.

Politisi fraksi Nasdem itu mengatakan bahwa sebagai ASN, berlaku sebagai pihak netral yang tidak bisa menjadi pengurus partai politik atau anggota partai politik dan tidak dapat juga menjadi tim kampanye atau tim sukses peserta Pemilu atau Pilkada.

Lebih Dekat dengan Adi Rasyid Ali, Sang Vokalis DPRD Kota Makassar

Adi Rasyid Ali, boleh jadi bisa dijuluki sang vokalis DPRD Kota Makassar, karena dinilai sebagai legislator yang cukup getol menyoroti kebijakan Pemerintah Kota Makassar.

Dari soal pengelolaan anggaran pemerintah daerah, kinerja birokrasi, hingga soal sampah tak luput dari kritiknya. Atas aksinya banyak yang gerah, sampai-sampai ada yang menyebar berita hoak tentangnya.

ARA bergeming, dia tetap teguh dengan sikap politiknya. "Itu bagian fungsi dewan, the show must go on; kalau kita benar tak perlu takut," katanya. Itulah prinsip hidup politisi muda kelahiran Makassar, 3 Mei 1972 ini.

Di politik, bila tidak vokal, maka akan tenggelam, dalam arti tidak akan direken orang. Meski demikian, kata dia, tidak boleh asal vokal, tapi harus menyampaikan kritik



dengan data dan sesuai dengan adat dan budaya kita, sipakatau, sipakainge dan sipakalebbi.

Manifestasi politik tersebut mencoba terus dijalankan oleh ARA di periode kedua keterpilihannya di DPRD Kota Provinsi periode 2019-2024.

Dia terpilih dari Daerah Pemilihan IV yang meliputi Kecamatan Manggala dan Kecamatan Panakkukang.

Pada Pemilu 2014-2019 dia berhasil mengantongi dukungan hingga 3.706 suara. Selanjutnya pada Pileg 2019-2024, dia terpilih kembali melalui Dapil yang sama dengan perolehan 3.382 suara.

Melalui proses politik, di periode kedua ini, dia dipercaya sebagai Wakil Ketua dan Koordinator Badan Anggaran DPRD Kota Makassar periode 2019-2024.

Sikap kritisnya dilatar belakangi keinginan





agar masyarakat, khususnya Kota Makassar tumbuh dan meningkat taraf kehidupannya. Oleh karenanya kebijakan-kebijakan yang dirumuskan dan ditentukan oleh Pemkot akan sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat.

ARA berharap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pemkot dapat menaikkan kesejahteraan masyarakat, bukan sebaliknya.

Di tengah rutinitas politiknya, ARA memiliki sejumlah gagasan tentang konsepsi ideal politik negara yang demokratis.

Dalam pandangannya, demokrasi substantif

hanya dapat ditopang oleh proses check and balances yang efektif antara legislatif dan eksekutif.

Menurutnya, demokrasi mandul ketika parlemen tidak mampu menjalankan fungsi evaluasi dan pengawasannya kepada pemerintah.

Hanya saja, untuk menjadi pihak yang konsisten melakukan kritik dengan benar, di tengah politik pragmatis saat ini, tidak mudah. Apa yang dilakukan ARA tidak lain sebagai manifestasi dari paradigma politiknya.



Pandangan Umum Fraksi pada APBD 2023 Jadi Fokus Pemkot Makassar

Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto memastikan pandangan-pandangan Fraksi DPRD Makassar pada APBD 2023 menjadi fokusnya.

Hal itu ditegaskan Danny Pomanto usai Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar dengan Agenda Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Penjelasan Wali Kota Makassar atas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 di Kantor DPRD Makassar, Jumat (21/6/2024).

"Pertama, saya pasti memperhatikan apa yang menjadi pandangan fraksi tadi, pasti karena semua yang disampaikan fraksi itu menjadi konsen kami," kata Danny.

Lebih jauh, dia mencontohkan, seperti Dana Kelurahan atau Dakel yang mana ada sosialisasi stunting itu ada baiknya memang dibelikan makanan saja. Sehingga, kata dia, penanganan stunting di Makassar jadi lebih efektif.

Kedua, soal anggaran retribusi. Ia mengakui bahwa di situ yang paling menonjol adalah tentang IMB yang mana IMB sekarang sudah berubah menjadi PBG. Olehnya sisa 20 persen saja pendapatan yang bisa ditarik dari situ, yang lainnya sudah di pusat.

Jadi, dia tekankan, bukan persoalan teman-teman di Bapenda atau pengelola retribusi tetapi memang karena aturannya. Juga soal pendapatan PDAM yang menurun.

Alasannya, lantaran PDAM dibebani tugas untuk mengelola air limbah atau IPAL. Yang mana beban listriknya saja mencapai Rp200 juta perbulan bukan per tahun. Bahkan kalau dihitung terjadi minus.

Tetapi, wali kota dua periode ini, menuturkan masih ada prediksi kurang lebih Rp3 miliar keuntungannya. "Jadi semata-mata bukan karena kinerja tetapi karena beban yang bertambah," tutupnya.





Dewan Pertanyakan Kinerja Direksi BUMD Makassar

Fraksi Nasdem meminta kepada Wali Kota Makassar selaku owner Perusahaan Daerah (Perusda) untuk mengevaluasi jajaran direksi Perusda Kota Makassar.

"Kami merekomendasikan adanya evaluasi jajaran Direksi BUMD yang ada sekarang," ujar Juru bicara Fraksi Nasdem Ari Ashari Ilham, pada rapat paripurna di kantor DPRD kota Makassar, Jumat (21/6/2024).

Ari Ashari mengatakan, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang terealisasi setiap tahunnya sangat rendah berada di angka 30,82 persen dari target.

"Fraksi Partai NasDem mempertanyakan mengapa realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah

setiap tahun sangat rendah?. Bagaimana dengan BUMD yang ada, apakah ada perusahaan yang tidak layak lagi dan tidak menghasilkan deviden?", ujar Ari.

Pihaknya menilai, sebagian besar BUMD atau Perusahaan Daerah milik Pemkot Makassar membiarkan adanya kebocoran pendapatan. Perumda yang paling menjaga dan melestarikan kebocoran yakni Perumda Parkir, seharusnya memiliki potensi pendapatan RP1 Triliun, namun tidak dikelola dengan baik.

"Ini karena kurangnya inovasi dan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pengelolaan pendapatan dan pengawasan pendapatan serta evaluasi, jadi perlu evaluasi," tandasnya.

Gerindra Apresiasi Penyusunan RPJPD Kota Makassar dan Dukung Percepatan

Fraksi Partai Gerindra melalui juru bicaranya, Nunung Dasniar, memberikan pandangan positif terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar 2025-2045.

Dalam pernyataannya, Nunung mengapresiasi upaya Pemerintah Kota Makassar dalam merumuskan visi dan misi pembangunan yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

"Kami memberi apresiasi kepada Wali Kota Makassar dalam pencapaian visi misi Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Ini diharapkan menjadi simpul yang mengikat keseluruhan elemen bangsa," ujar Nunung dalam rapat paripurna ketiga masa persidangan ketiga tahun sidang 2023/2024 DPRD Kota Makassar.

Nunung berujar bahwa fraksinya mencatat beberapa hal penting terkait RPJPD Kota Makassar, di antaranya proses penyusunan RPJPD yang berpedoman pada RPJPN.

"Perda RPJPD Kota Makassar 2025-2045 telah memasuki rencana akhir di mana proses penyusunan tersebut kami perhatikan telah berpedoman kepada RPJPN 2025 2045 serta RPJPD Sulsel," jelasnya.

Kemudian, RPJPD Kota Makassar dinilai telah selaras dengan Visi Indonesia Emas 2024.

"Pemkot Makassar telah merumuskan dan menyelaraskan visi RPJPD dengan visi pembangunan jangka panjang nasional, yaitu "Makassar Kota Dunia, Maju dan Berkelanjutan, serta Sombere and Smart untuk Kita Semua," tutur Nunung.

Catatan terakhir dari fraksi Gerindra adalah bahwa Pemerintah Kota Makassar telah melakukan penyelarasan sasaran visi RPJPD dengan menetapkan lima sasaran visi dan delapan indikator kerja.



Kasrudi Pertanyakan Minimnya Pencapaian Retribusi Daerah di Tahun 2023



Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi Gerindra, Kasrudi, menyampaikan pandangan umum fraksinya mengenai penjelasan Wali Kota Makassar terkait pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Penjelasan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna ketujuh masa persidangan ketiga tahun sidang 2023/2024 DPRD Kota Makassar, pada Jumat (21/6/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Kasrudi menyampaikan apresiasi atas penjelasan Wali Kota Makassar tentang Rancangan Peraturan Daerah terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

"Kami memberikan apresiasi kepada Wali

Kota Makassar tentang penjelasan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah Tahun Anggaran 2023," ujar Kasrudi.

Fraksi Gerindra juga memuji capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2023 yang telah terealisasi sebesar Rp56 triliun lebih dari target Rp96 triliun lebih atau sebesar 79,78%.

"Suatu pencapaian yang luar biasa di tengah situasi ekonomi yang diprediksi berbagai kalangan akan suram di tahun 2023," tambah Kasrudi.

Kasrudi juga menyoroti capaian pendapatan pajak daerah yang terealisasi sebesar Rp1,35 triliun lebih dari target Rp1,48 triliun lebih atau mencapai 91,21%.



Fraksi PAN Fokus Pembangunan Berbasis Kearifan Lokal dan Inovasi

Dalam rapat paripurna DPRD Kota Makassar, juru bicara fraksi Amanat Nasional (PAN), Hamzah Hamid, menyampaikan pandangan fraksinya terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Kota Makassar pada Selasa (28/5/2024) ini menjadi ajang diskusi penting mengenai masa depan pembangunan kota Makassar.

Hamzah Hamid menegaskan komitmen Indonesia untuk mewujudkan visi menjadi salah satu dari lima negara dengan perekonomian terbesar di dunia pada tahun 2045.

Menurutnya, hal ini memerlukan pembangunan yang intensif baik di tingkat nasional maupun lokal, dengan mengedepankan kearifan lokal dan inovasi

daerah.

"Untuk mencapai sasaran tersebut, diperlukan pembangunan pada tingkat nasional dan lokal secara maksimal, oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan memanfaatkan kearifan lokal dan kreatifitas daerah," ucapnya.

Visi RPJPD, sebagaimana dijelaskan oleh Hamzah, akan diimplementasikan melalui empat tahapan strategis.

Mulai dari penguatan dasar transformasi pada periode 2025-2029, akselerasi transformasi pada 2030-2034, ekspansi global pada 2035-2039, hingga penyesuaian transformasi sosial dan ekonomi pada 2040-2045 yang akan didukung oleh tata kelola inovatif.

Lebih lanjut, Hamzah menekankan pentingnya semangat gotong royong dan integrasi teknologi untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.

Legislator Makassar Gerah Persoalan Air Bersih Warga Barombong Tak Pernah Jadi Prioritas

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Makassar desak Perumda Air Minum (PDAM) untuk segera memenuhi kebutuhan air bersih Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.

"Semenjak saya di periode pertama sampai sekarang sudah 10 tahun, saya sering sampaikan aspirasi warga Kelurahan Barombong yang sebagian belum mendapatkan air PDAM tapi



“Air minum salah satu kebutuhan yang sangat mendasar buat masyarakat,” tandasnya.

belum juga terrealisasikan,” ujar anggota Komisi D DPRD Makassar Yeni Rahman.

Yeni menjelaskan, pihak PDAM kerap menyampaikan alasan klasik terkait sumber air baku utama yang

digunakan untuk mengaliri setiap rumah warga.

Harusnya kata Yeni, PDAM memiliki inovasi ataupun solusi untuk mengatasi masalah yang dialami warga di kelurahan Barombong.

“Masa kita pasrah dengan keadaan tidak ada sumber air baku. Masa 10 tahun tidak bisa menemukan sebuah terobosan atau menemukan sebuah solusi,” katanya.

“PDAM juga harus punya inovasi, airnya ditarik dari mana, atau didapat darimana jangan biarkan masyarakat yang kesusahan air,” lanjutnya.

Yeni merasa, ada pendiskriminasian dalam menikmati air bersih dari PDAM kota Makassar, dimana pada titik titik daerah yang berdekatan dengan pusat kota Makassar menjadi prioritas utama PDAM, sehingga beberapa lainnya terabaikan.

“Air minum salah satu kebutuhan yang sangat mendasar buat masyarakat, jadi tidak boleh ada diskriminasi soal menikmati air. Jangan karena dia di ujung sana karena dia perbatasan jadi kurang diperhatikan,” tandas.



Sekretariat DPRD Makassar Sosialisasikan **Perda Baca Tulis Al-Qur'an**

Pendidikan baca tulis Al-Qur'an sangat dibutuhkan guna meningkatkan sumber daya manusia yang berakhhlak mulia dan budi pekerti yang baik. Terutama bagi generasi muda yang kelak menjadi harapan bangsa.

Hal ini yang melatarbelakangi Sekretariat DPRD Kota Makassar menggelar kegiatan sosialisasi penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an.

Sosialisasi Perda Angkatan XII itu digelar di Hotel Sarison, Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar, Minggu

(23/6/2024).

Hadir sebagai narasumber masing-masing Muhammad Iqbal Djalil, Arief, serta Imran Rosadi Bachri. Jalannya kegiatan sosper ini dipandu oleh Muchsamin Said selaku moderator.

"Melalui pendidikan baca tulis Al-Qur'an kita berharap anak-anak kita bisa menjadikannya sebagai pedoman hidup dan diamalkan dalam aktivitasnya sehari-hari," kata Muhammad Iqbal Djalil dalam pemaparan materinya.

Ia pun meminta masyarakat untuk tidak pernah risau dengan rezeki yang terbatas. Sebab katanya, dibalik semua

aktivitas sehari-hari pasti akan ada balasannya dari Yang Maha Kuasa.

"Jadi kalau Al-Qur'an sudah dibaca dan dipraktekkan, maka percaya kita sama halnya dengan menjalankan sifat Nabi Muhammad SAW. Mari kita bumikan pendidikan baca tulis Al-Qur'an ini dalam kehidupan kita," tambahnya.

Pemateri selanjutnya, yakni Arief menjelaskan bahwa fungsi perda ini bertujuan untuk menjadikan semua aturan punya landasan hukum dan bisa dijadikan rujukan oleh semua pihak dalam menjalankan tugasnya.

Catatan Fraksi PKS DPRD Makassar Buat Wali Kota Danny

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kota Makassar meminta Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto, memperhatikan pelayanan publik yang ada di kota Makassar.

Hal tersebut di ungkapkan juru bicara Fraksi partai PKS Yeni Rahman saat rapat paripurna tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kota Makassar 2023, di ruang rapat kantor DPRD kota Makassar Jl AP Pettarani.

Katanya, Fraksi PKS memberikan apresiasi atas keberhasilan mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas pengelolaan keuangan APBD 2023.

"Kami melihat kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas dari seluruh OPD untuk bersama-sama bersinergi memperoleh capaian luar biasa ini," katanya.

Raihan Opini WTP tersebut bukan berarti sudah tidak ada kekurangan dan perbaikan yang perlu dilakukan. Justru secara administratif, raihan ini mendorong kita untuk bekerja dengan lebih baik lagi.

"Kami mencatat dan selalu memantau dengan baik saran-saran dan pertimbangan dari BPK agar dapat segera ditindak lanjuti dan agar tidak terulang dimasa-masa yang akan datang," ujarnya Katanya, setidaknya 9 point yang perlu menjadi perhatian Danny Pomanto dalam melakukan pelayanan publik.

Berikut deretan point yang perlu mendapatkan perhatian dan penjelasan diantaranya:

1. Apa Upaya yang dilakukan dalam mengatasi tingginya harga-harga kebutuhan pokok pada saat kondisi ekonomi masyarakat yang semakin berat? Mohon penjelasan.



2. Bagaimana perbaikan pelayanan di puskesmas pada PABD 2023? Kami menemukan adanya Puskesmas yang jam pelayannya belum sesuai, bahkan ada yang sudah tidak melayani setelah istirahat sholat dhuhur dengan berbagai alasan. Mohon penjelasan.

3. Sudah sampai dimana tahapan Pembangunan Sirkuit di Untia? sudah berjalan sampai pada tahapan apa pada tahun 2023 dan apa yang akan dituntaskan pada tahun 2024?.

4. Sejauhmana peran yang dilakukan Pemkot Makassar dalam mewujudkan pembangunan stadion? Mohon Penjelasan.

5. Sejauhmana peran pemerintah dalam mengatasi penyakit sosial masyarakat berupa judi online? Mohon Penjelasan.

6. FPKS mendukung agenda pengentasan dan pencegahan stunting di Kota Makassar. Akan tetapi penggunaan alokasi anggaran harus efektif dan sesuai dengan kondisi setiap kelurahan, tidak bisa disamaratakan. sejauhmana pelaksanaannya dan kelurahan apa saja yang menjadi sentra stunting di Kota Makassar?.

7. Mohon penjelasan pembangunan infrastruktur sekolah – sekolah yang menjadi temuan karena kondisinya yang sudah rusak, baik atap hingga temboknya.

8. Mohon penjelasan penggunaan anggaran untuk lorong wisata. Apa saja indikator keberhasilan yang dilaksanakan?

9. Pada Pemandangan Umum tahun lalu atas penggunaan APBD 2022, FPKS telah menyarankan untuk mempercepat penetapan kepala sekolah yang statusnya masih pejabat sementara.

Syukuran dan Perayaan Ulang Tahun ke-42 Rudianto Lallo: Panjang Umur Pengabdian

Selasa, 4 Juni 2024, Hotel Maxone, Kota Makassar menjadi saksi kemeriahannya acara syukuran dan perayaan ulang tahun ke-42 Ketua DPRD Makassar, Rudianto Lallo. Acara ini juga merayakan terpilihnya Rudianto sebagai anggota DPR-RI. Dia terpilih dari Dapil Sulsel 1 dengan perolehan 97.597 suara.

Perayaan berlangsung meriah. Dihadiri sejumlah tokoh Sulsel, Makassar dan sejumlah politisi yang mengenakan dress code putih.

Para tamu undangan bergantian memberikan ucapan selamat dan

doa terbaik kepada politikus Nasdem itu. Rudianto Lallo menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua pihak, telah mendukung dan mendoakannya selama ini.

"Percayalah, saya tidak akan meninggalkan orang-orang yang sudah berjasa bagi saya. Terima kasih kepada istri saya yang telah mendampingi selama kurang lebih sembilan tahun. Terima kasih untuk ummiku tercinta yang selalu mendoakan saya. Terima kasih untuk semua anak rakyat," pungkasnya



Sosialisasi Perda Peningkatan Kualitas

Ketua TP PKK Kota Makassar sekaligus Bunda PAUD Kota Makassar Indira Yusuf Ismail, berperan sebagai narasumber dalam Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Sosialisasi ini diselenggarakan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar Komisi D, Abdul Wahab Tahir, di Hotel Lynt

Makassar, Jumat
(14/6/2024).

Di awal pemaparannya, Indira menyampaikan pandangannya tentang pentingnya dilakukan sosialisasi peraturan daerah ini sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Makassar.

"Semua Perda yang sudah disusun perlu disosialisasikan agar Perda ini bisa dilaksanakan dan dijalankan oleh seluruh masyarakat Kota Makassar," ungkap Indira.

Indira berujar bahwa kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sangat penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif serta memastikan setiap anak di

Kota Makassar mendapatkan akses pendidikan yang layak dan berkualitas "Salah satu visi misi pemerintah kota adalah memastikan semua anak mesti sekolah agar anak-anak kita cerdas. Sebab anak-anak adalah warisan kita dan mereka harus kita didik dari usia dini. Ibarat kalau kita mau dirikan bangunan, yang paling penting adalah pondasinya," tuturnya.

Sejauh ini, Pokja Bunda PAUD Kota Makassar telah bersinergi dengan Dinas Pendidikan Kota Makassar untuk menghadirkan sekolah PAUD yang berstandar internasional.

Targetnya, akan ada satu PAUD berstandar internasional yang akan hadir di setiap kecamatan di Kota Makassar.

"Bagaimana mau dididik anak-anak kita kalau sarana dan prasarana tidak memadai? Jadi saya usul paling tidak ada satu PAUD di setiap kecamatan," jelasnya.

Saat ini, PAUD berstandar internasional sudah dibangun di dua kecamatan, yakni Kecamatan Mariso dan Tamalate. Indira berharap, target penyediaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini ini bisa segera terealisasi.



Perkenalkan Tupoksi Anggota Dewan ke Mahasiswa KKLP

Kepala Bagian (Kabag) Humas dan Protokol DPRD Kota Makassar, Syahril mengajak mahasiswa Kuliah Kerja Lapangan Profesi (KKLP) untuk memperkenalkan tugas dan fungsi anggota DPRD.

Menurut Syahril, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih mendalam tentang peran dan tanggung jawab anggota dewan dalam pemerintahan. "Bersama-sama kita belajar dan memahami lebih dalam tentang demokrasi dan peran

pembangunan daerah," sambungnya. Kegiatan ini mendapat respon positif dari mahasiswa KKLP yang merasa mendapatkan banyak wawasan baru mengenai pemerintahan daerah dan tugas-tugas anggota DPRD.

Mereka juga diajak untuk lebih kritis dan aktif dalam mengawasi kinerja pemerintahan di masa depan.

Dengan adanya kegiatan ini, DPRD Kota



serta fungsi DPRD," kata Syahril saat menerima kunjungan mahasiswa KKLP UNiversita Muslim Indonesia Makassar di Kantor DPRD Makassar, Selasa (25/6/2024).

"Harapannya, generasi muda ini bisa lebih peduli dan aktif berpartisipasi dalam

Makassar berharap dapat menumbuhkan kesadaran dan pemahaman generasi muda mengenai pentingnya peran legislatif dalam pembangunan daerah dan mendorong partisipasi aktif mereka dalam proses demokrasi.

Azwar Dorong Pemuda Makassar Berperan dalam Pembangunan



Anggota DPRD Makassar, Azwar menggelar kegiatan sosialisasi penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 06 Tahun 2019 tentang Kepemudaan di Hotel Max One, Makassar, Minggu (9/6/2024). Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pemuda bagaimana peran mereka di dalam Perda tersebut.

Ratusan konstituen di wilayah daerah pemilihan (Dapil) 4 meliputi Kecamatan Panakkukang dan Manggala hadir dalam giat tersebut.

Azwar saat memberi sambutan sekaligus membuka kegiatan menyampaikan, dengan mengetahui substansi dan muatan dari Perda Kepemudaan, para pemuda diharapkan dapat mengetahui perannya dalam turut serta membangun kota.

"Mengetahui Perda kepemudaan tersebut, pada gilirannya turut menyuksekan pelaksanaan. Karena masalah kepemudaan harus melibatkan para pemuda itu sendiri dalam pembinaan agar menjadi orang yang berkarakter membangun kota dan negara ini," kata Azwar.

Legislator PKS itu berharap agar pemuda bisa mengaplikasikan dan mengambil peran di tengah masyarakat.

"Kalau pemuda tahu perannya, setidaknya kenakalan remaja, pemuda terkait tindak kriminalitas juga bisa diturunkan," katanya.

Dalam sosialisasi Perda kepemudaan itu melibatkan dua narasumber, yakni M Yusran, SKM dan Muh Noer Ashari.



FOTO: ISTIMEWA



Rudianto Lallo Ajak Masyarakat Jaga Keutuhan dan Keharmonisan Bangsa

Ketua DPRD Makassar, Rudianto Lallo, (RL) berpesan agar seluruh masyarakat untuk terus menjaga keutuhan dan keharmonisan bangsa. Hal ini disampaikan RL dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Juni.

Rudianto Lallo menegaskan pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan panduan hidup berbangsa dan bernegara.

Untuk itu, RL menekankan bahwa Pancasila merupakan fondasi yang kuat untuk menciptakan kehidupan yang damai, adil, dan makmur di Indonesia. "Mari kita terus menjaga keutuhan dan keharmonisan bangsa. Nilai-nilai Pancasila harus selalu dihayati dan diamalkan dalam setiap aspek kehidupan

kita," ujar Rudianto Lallo.

Politisi dengan tagline 'Anak Rakyat' itu menjelaskan bahwa Pancasila, yang terdiri dari lima sila itu harus menjadi pedoman utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta merupakan cerminan dari keragaman dan persatuan yang ada di Indonesia.

Dengan semangat kebersamaan dan gotong royong, Rudianto Lallo berharap seluruh masyarakat Makassar dapat terus berkontribusi dalam menjaga perdamaian dan kesejahteraan bangsa. Kata RL, Hari Pancasila menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjalankan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila.

Ketua DPRD Makassar Sosialisasi Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik

Ketua DPRD Makassar, Rudianto Lallo, menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. Acara tersebut berlangsung di Hotel Grand Maleo pada Senin, (3/06/2024).

Dalam kegiatan ini, dua narasumber turut hadir untuk memberikan pemaparan. Munawir bertindak sebagai narasumber pertama, sementara Muhammad Ridwan menjadi narasumber kedua. Acara ini dipandu langsung oleh moderator Mia Aryani.

Pada kesempatan tersebut, RL akronim nama Rudianto Lallo, mengatakan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait pentingnya pengelolaan air limbah domestik yang baik dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Jadi kami punya tugas untuk mensosialisasikan perda yang ada. Saya mengambil perda pengelolaan air limbah domestik agar bisa dipahami dengan baik oleh warga," ujarnya.

RL menjelaskan perda tersebut menjadi salah satu permasalahan yang berkepanjangan dan cukup sulit untuk diatasi karena akan terus ada mengikuti perkembangan kehidupan manusia. Olehnya itu, Rudianto Lallo menekankan, Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan air limbah domestik menjadi tanggung jawab setiap warga dan pemerintah kota.

"Jadi setiap perda yang kita buat itu, penting untuk kita semua ketahui karena ini menjadi tanggung jawab kita semua sebagai warga kota Makassar." jelasnya.





Faisal Andi Sapada Meninggal Dunia, Andi Nurhaldin: Kita Kehilangan Panutan

Mantan Wakil Wali Kota Parepare periode 2013-2018, Faisal Andi Sapada (FAS) meninggal dunia di RS Wahidin Sudirohusodo, Makassar, Rabu (5/6/2024). Ia meninggal usai menjalani perawatan setelah sebelumnya dilarikan ke rumah sakit karena mengalami serangan jantung.

Duka cita mendalam pun turut dirasakan oleh semua kalangan. Termasuk Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Andi Nurhaldin NH.

Bakal calon Walikota Parepare itu pun melayat langsung ke rumah duka almarhum yang terletak di Kompleks Institut Andi Sapada, Jalan Andi Sapada, Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat, Parepare. Andi Nurhaldin tiba di rumah duka sekitar

pukul 22.00 Wita.

"Saya menyampaikan rasa duka cita mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan. Kita semua kehilangan sosok yang selama ini menjadi panutan," kata putra Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurdin Halid itu.

Di mata Andi Nurhaldin, Faisal Andi Sapada adalah sosok yang bijak dan bersahaja. Ia pun mengaku banyak mengambil pelajaran dari kisah hidup dan perjalanan karier almarhum.

"Banyak pelajaran berharga yang bisa dipetik dalam kisah dan perjalanan hidupnya. Saya beberapa kali bertemu dan berdiskusi dengan beliau dalam beberapa kesempatan terakhir ini," demikian Andi Nurhaldin.

Andi Pahlevi Harap Penggerjaan Infrastruktur di Dapil 2 Berjalan Baik

Anggota DPRD Kota Makassar, Andi Pahlevi memaparkan sejumlah perkembangan infrastruktur yang ada saat ini. Terkhusus di daerah pemilihannya. Demikian disampaikan Andi Pahlevi saat menerima warga pada kunjungan dapil di Diandra Cafe, Jalan Pandang Raya, Makassar, Rabu (5/6/2024).

Khusus di dapil 2, ia mengatakan penggerjaan drainase hingga lorong wisata sudah berjalan. Ia memastikan semuanya akan rampung sesuai jadwal. "Saya pantau tadi sudah ada dikerjakan ada lorong wisata, drainase dan ada beberapa lainnya," katanya. Adapun penggerjaan lainnya di beberapa wilayah tetap akan dipantau. Ia mengatakan setelah itu akan dilaporkan

ke pemerintah kota.

"Kita bisa sampaikan ke pemerintah kota bahwa kegiatan yang ada sudah sampai. Ada evaluasinya, ada laporannya," kata legislator dari Fraksi Gerindra ini.

"Yang jelas kegiatan fisik yang sudah ada di pokok itu dijalankan yang kita mau tunggu realisasinya bagaimana nanti," bebernya.

Andi Pahlevi tak menampik masalah yang ada di wilayahnya adalah Infrastruktur. Ia pun mengaku senang wilayahnya sudah dapat penggerjaan. "Memang semua masalah di kelurahan itu hampir sama yah, namun Alhamdulillah sudah ada beberapa yang dikerjakan," tutupnya.





Manfaat Bunga Telang Bagi Kesehatan

Bunga telang, yang juga dikenal dengan nama ilmiahnya Clitoria Ternatea, adalah tanaman merambat yang berasal dari daerah tropis di Asia, termasuk Indonesia. Bunga ini dikenal dengan kelopaknya yang berwarna biru mencolok, meskipun ada juga varian berwarna ungu dan putih. Bunga telang telah lama digunakan dalam berbagai kegiatan, tidak hanya sebagai tanaman hias, tetapi juga sebagai bahan dalam pengobatan tradisional, pewarna alami, dan minuman herbal yang menyehatkan.

Di beberapa negara Asia, bunga telang digunakan sebagai pewarna alami untuk makanan dan minuman. Misalnya, di Thailand bungan ini digunakan untuk membuat minuman yang disebut "nam dok anchan", yang ketika ditambahkan jus lemon, akan berubah warna dari biru menjadi ungu, menciptakan efek visual yang menarik. Bunga telang tidak hanya menarik dari segi estetika, tetapi juga dikenal memiliki berbagai manfaat

kesehatan yang signifikan. Berikut beberapa di antaranya :

- 1. Mencegah Tumbuhnya Sel Kanker**
- 2. Menurunkan Demam**
- 3. Mengontrol Tekanan Darah**
- 4. Meredakan Gejala Alergi**
- 5. Menjaga Kesehatan Mata**

Bila Anda merasa mual, diare, dan sakit perut setelah mengonsumsi bunga telang, sebaiknya periksakan diri ke dokter agar dapat diberikan penanganan yang tepat. Anda juga sebaiknya berkonsultasi dengan dokter jika ingin memetic manfaat bunga telang untuk pengobatan penyakit, terutama yang tersedia dalam bentuk suplemen.

"Indonesia Layak Anak (Idola) yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030 sesuai dengan Dokumen Nasional yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak," pungkas

Mengenal Tanda Asam Lambung Naik dan Cara Mengatasinya



Banyak di antara masyarakat Indonesia yang memiliki permasalahan dengan asam lambung mereka. Naiknya asam lambung merupakan salah satu masalah pencernaan yang paling sering terjadi. Maka tak heran kalau masih ada banyak orang yang mengabaikan gejala naiknya asam lambung.

Asam lambung sendiri sebenarnya adalah cairan yang berfungsi untuk membantu proses pencernaan makanan. Namun ketika kadar asam lambung berlebih, sistem pencernaan pun mengalami masalah. Lalu, apa saja tanda asam lambung naik dan bagaimana cara mengatasinya?

Ketika asam lambung naik, tentu ada tanda-tanda yang menjadi alarm peringatan. Jika tanda-tanda tersebut sudah muncul, sebaiknya kamu segera bersiap menanganinya agar tidak timbul gejala yang lebih parah. Berikut ini adalah lima tanda asam lambung naik yang harus kamu ketahui.

1. Mulut terasa asam

Pertama, ketika asam lambung naik, mulut akan terasa asam. Hal ini terjadi karena masuknya asam lambung ke area esofagus. Keadaan ini biasanya diiringi juga dengan produksi air liur yang berlebih.

2. Terlalu sering bersendawa

Selanjutnya, masih berhubungan dengan naiknya asam lambung ke area esofagus, kerongkongan pun terasa selalu ingin bersendawa. Ketika bersendawa, mungkin rasanya jadi lebih ringan. Namun hal itu hanya bersifat sementara.

3. Keringat dingin

Berkeringat dingin tanpa disertai dengan sebab yang jelas bisa menjadi tanda-tanda naiknya asam lambung. Ada obat-obatan tertentu yang bisa memproduksi keringat sekaligus meningkatkan asam lambung. Contohnya adalah obat antidepresan dan analgesik.

4. Mual hingga ingin muntah

Terakhir, ketika asam lambung naik, muncul perasaan mual yang mengganggu. Mual ini terjadi karena cincin otot di bagian bawah kerongkongan tidak bisa berfungsi dengan baik. Dalam kondisi normal, otot tersebut akan menutup ketika makanan sudah masuk ke lambung.

Ketika asam lambung naik, dan gejalanya sudah kamu rasakan, tidak perlu khawatir atau panik dulu. Kamu bisa mencoba mengatasinya sendiri atau dengan meminta bantuan teman di sekitar. Kondisi naiknya asam lambung pada umumnya tergolong ringan dan bisa ditangani secara mandiri.

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD



Dr. MUHAJIR. S.KM, M.Kes
Kepala Bagian Umum

ABDUL KADIR, SE, MM
Kepala Bagian Keuangan

DAHYAL, S.E.
Sekretaris DPRD

AHMAD JAYA, SH
Kasubag Rumah Tangga

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

MUHAMMAD AKBAR RASYID, S.T
Kasubag Perlengkapan

MUHAMMAD IHSAN, S.Sos, M.Si
Kasubag Kepegawaian

ORGANISASI DPRD KOTA MAKASSAR



KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL

Inan Basir

MAKASSAR MENUJU KOTA METavers

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA MAKASSAR
KAREBA PARLEMENTA

www.dprd.makassarkota.go.id

H. Moh. Ramdhani Pomanto
Walikota

dprd eAjamma DPRD MAKASSAR

Rudianto Lallo Adi Rosyid Ali Hj. A. Suhada Sappale A. Nurholdin NH
Walikota Ketua DPRD Walikota Ketua DPRD Walikota DPRD
H. Dahyai Sembiring DPRD

LORONG WISATA **META VERSE**



MAKASSAR MENUJU KOTA METavers

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA MAKASSAR
KAREBA PARLEMENTA

www.dprd.makassarkota.go.id

Rudianto Lallo Adi Rosyid Ali Hj. A. Suhada Sappale A. Nurholdin NH
Walikota DPRD Walikota DPRD Walikota DPRD
PIMPINAN SEKRETARIAT DPRD KOTA MAKASSAR

dprd eAjamma DPRD MAKASSAR

TABLOID **RUMAH RAKYAT**
DPRD KOTA MAKASSAR